


**ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PROGRAM SWASEMBADA
PANGAN DI WILAYAH (PROGRAM UPSUS PAJALE DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA)**

***Stakeholder Analysis In Program Food Self-Sufficiency in the Region
(UPSUS PAJALE Program In North Bengkulu Regency)***

Adis Imam Munandar¹⁾, Achmad Hafid²⁾ 

¹ *Lecturer National Resilience Faculty, Indonesia University*

² *School of Sstrategic and Global, National Resilience Study, Indonesia
University*

Email: ahafid3336@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role and level of importance, level of strength and level of legitimacy in food self-sufficiency programs implemented in the region. Food self-sufficiency is a food security program that is very important so that the program involves many stakeholders and the role of each stakeholder in the success of the program. This study uses a stakeholder management approach in the data analysis used. This research was conducted in North Bengkulu Regency in the UPSUS PAJALE program. The results of the study are the role of the local government stakeholders, the Food Crops and Extension Agency has a high level of importance, strength and level of legitimacy compared to other stakeholders so that the level of coordination and collaboration between stakeholders is needed so that the UPSUS PAJALE program can run smoothly and successfully.

Keywords: *Food Self-Sufficiency, UPSUS PAJALE, Stakeholder Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta tingkat kepentingan, tingkat kekuatan dan tingkat legitimasi dalam program swasembada pangan yang dilaksanakan di wilayah. Swasembada pangan merupakan program ketahanan pangan yang sangat penting sehingga program tersebut banyak melibatkan stakeholder dan peran masing – masing stakeholder dalam mensukseskan program tersebut. Kajian ini

menggunakan pendekatan manajemen stakeholder dalam analisis data yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara pada program UPSUS PAJALE. Hasil dari penelitian adalah peran dari stakeholder Pemda, Dinas Tanaman Pangan dan Penyuluh memiliki tingkat kepentingan, tingkat kekuatan serta tingkat legitimasi yang tinggi dibandingkan dengan stakeholder yang lainnya sehingga diperlukan tingkat koordinasi serta kerjasama antar stakeholder agar program UPSUS PAJALE dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Kata kunci: Swasembada Pangan, UPSUS PAJALE, Manajemen Stakeholder

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang pertanian mempunyai peran dalam penyediaan kebutuhan bahan pokok serta kebutuhan bahan pangan bagi seluruh penduduk maupun menyediakan bagi kebutuhan bahan baku untuk bidang industri, serta untuk perdagangan ekspor dibidang pangan (Suparta, 2010). Pertanian merupakan bidang yang perlu diperhatikan oleh suatu negara, hal ini karena pertanian sumber kehidupan bagi penduduk suatu negara. Pertanian menyediakan bahan pangan untuk kelangsungan hidup penduduk, sumber penghasilan sebagian penduduk dan sumber devisa negara jika produk pertanian di dapat ekspor (Herdiasti, 2012).

Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas wilayah 1.638.584 Km² dengan penduduk berjumlah 287.439 jiwa (BPS Bengkulu Utara, 2016). Salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar dengan luas lahan pertanian, dengan luas lahan pertanian seluas 49.184 Ha, lahan pekerbunan seluas 240.0770 Ha, lahan yang masih berupa rawa atau ladang hutan seluas 703.736 Ha dan yang sudah berupa pemukiman seluas 8.736.644,9 Ha dan lahan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara adalah 0,0659 m²/Org (BPS Bengkulu Utara, 2016).

Tabel 1. Luas lahan panen tanaman pangan di Bengkulu Utara.(Ha)

No	Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi Sawah	20.549	20.582	22.919	22.827	15.668
2	Padi Ladang	3.688	3.571	2.053	2.397	1.089
3	Jagung	4.136	2.848	1.269	1.045	1.601
4	Kedelai	470	185	192	353	675
5	Kacang Tanah	1.146	1.029	567	593	507
6	Kacang Hijau	467	355	282	256	197
7	Ubi Jalar	486	498	374	525	356
8	Ubi Kayu	803	629	407	454	538
Total		31.745	29.697	28.063	28.450	20.629

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Utara (2012-2016)

Tanaman bahan makanan terdiri dari padi dan palawija lainnya (Jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau). Padi merupakan

produk pokok utama subsektor bahan makanan di Kabupaten Bengkulu Utara yang dipengaruhi oleh luas lahan panen dan produktivitas panen perhektar. Produksi padi di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami penurunan dari 87.505 ton di tahun 2010 menjadi 74.489 ton di tahun 2011 atau sebanyak 14,40 % yang terdiri dari 68.565 ton padi sawah dan 7.924 ton padi ladang. Penurunan ini terjadi karena menurunnya luas lahan panen padi sebesar 10,03 % dibanding tahun sebelumnya yaitu 23.444 ha di tahun 2010 menjadi 21.092 Ha di tahun 2011 (BPS Bengkulu Utara, 2012).

Tabel 2 . Produksi pangan di Kabupaten Bengkulu Utara.(Ton)

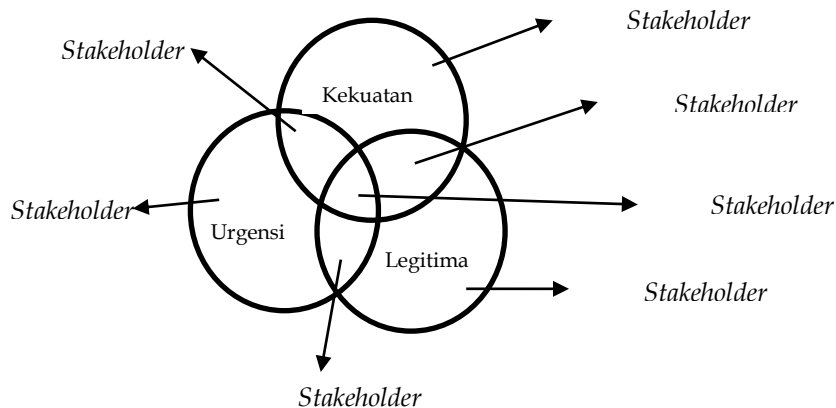
No	Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi Sawah	92.127,89	90.731,1	85.708	103.562,90	75.480,87
2	Padi Ladang	7.442,10	6.816,7	4.526	4.535,1	1.805,57
3	Jagung	18.672,33	13.451,8	7.305	6.800,34	1.601
4	Kedelai	519,80	201,4	210,70	396,9	1.273,17
5	Kacang Tanah	2.936,84	3.231,5	542	1.938,12	1.611,07
6	Kacang Hijau	454,61	344,2	283	248,12	190,2
7	Ubi Jalar	3.648,70	4.036,9	3.538	4.057,1	2.758,90
8	Ubi Kayu	5.481,4	4.178,8	5.923	2.823	3.672,60

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Utara (2012-1016)

Tabel 2 menjelaskan tentang jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Bengkulu Utara terutama pada hasil panen tanaman padi dan jagung mengalami penurunan dari tahun 2014 s.d tahun 2016, sedangkan pada sektor tanaman kedelai mengalami peningkatan.

Program mewujudkan swasembada pangan menjadi hal yang penting untuk dicapai dan seharusnya menjadi perhatian dari semua komponen bangsa (*Stakeholder*) baik dari instansi pemerintah maupun instansi terkait yang mempunyai keterlibatan atau berperan dalam program tersebut. Analisis tentang peran dari setiap pemangku kepentingan merupakan suatu proses guna mengidentifikasi serta menjelaskan peran individu, kelompok serta organisasi yang dipengaruhi atau dapat memengaruhi lingkungan dan generasi yang akan datang, serta memprioritaskan individu-individu dan kelompok untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Freeman, 1984).

Terlihat pada Gambar 1 pembuatan suatu kebijakan merupakan proses sosial yang dilakukan oleh para aktor dan diantara para aktor, sebuah upaya yang rasional untuk mencari solusi secara optimal dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau isu yang ada (Hermans dan Thissen, 2009).



Gambar 1
Garis besar *Stakeholder* (Hermans dan Thissen, 2009)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) antara metode kualitatif dan metode kuantitatif dimana metode ini memberikan asumsi dimana dalam menunjukan arah atau memberi petunjuk tentang cara pengumpulan data menganalisa data serta perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui beberapa proses atau fase penelitian (Creswell, *et al*, 2008).

Dasar *mixed methods research* adalah memadukan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar dapat menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan menggunakan salah satu metode penelitian saja. Tujuan menggunakan pendekatan *mixed methods* adalah agar menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian dikarenakan peneliti memiliki kebebasan dalam menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang akan dibutuhkan (Creswell, dkk, 2008).

Tahap perencanaan akan sangat berpengaruh pada penyusunan strategis karena keberadaan *stakeholder* bagi banyak program atau proyek merupakan hal yang strategis (Cleland, 1996). *Stakeholder* perlu ditinjau ulang dari waktu ke waktu karena perilaku masing – masing *stakeholder* dapat berubah – rubah sesuai dengan kepentingan masing – masing *stakeholder* dan akan berimplikasi terhadap analisis *stakeholder* (Pouloudi, *et al* 1997).

Proses analisis *stakeholder* dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap. Ketiga tahap proses ini dibedakan berdasarkan tingkat partisipasi *stakeholder* terhadap pelaksanaan analisis yaitu:

1. Proses tertutup. Proses ini dilakukan pada proyek pribadi atau organisasi yang dilaksanakan pertemuan *stakeholder* secara tertutup atau tanpa melibatkan narasumber atau fasilitator.
2. Proses terbuka. Proses ini dilakukan dengan banyak *stakeholder* melalui lokakarya atau pengumpulan banyak pendapat serta informasi tentang *stakeholder* baik secara langsung maupun dengan penyebaran kuisioner.
3. Proses campuran. Proses ini merupakan kombinasi dari proses 1 (satu) dan proses 2 (dua) yang mengkombinasikan proses tertutup dan proses terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran tingkat kekuatan *stakeholder*

Pengukuran tingkat kekuatan stakeholder disajikan pada Tabel 3. Tabel ini memberikan penjelasan tentang bagaimana peran dan tingkat kekuatan masing-masing *stakeholder* dalam mendukung program ketahanan pangan yang sudah di programkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian khususnya program UPSUS PAJALE yang dilaksanakan di wilayah oleh pemerintah daerah.

Tabel 3. Tingkat kekuatan *stakeholder*

No	Stakeholder	Skore				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Cukup Tinggi	Kurang Tinggi	Rendah
1	Pemda	x				
2	Kodim (Babinsa)		x			
3	Dinas Ketahanan Pangan			x		
4	Dinas Tanaman Pangan	x				
5	Penyuluh Pertanian		x			
6	Kelompok Tani				x	

Tabel tersebut menggambarkan kekuatan dari Pemerintah Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural, Penyuluh dan kelompok tani memiliki kekuatan yang tinggi dalam mensukseskan program tersebut mulai dari penyiapan infrastruktur serta penyiapan program dan akses pangan yang ada di wilayah. Kodim memiliki nilai yang lebih rendah 1 tingkat dibandingkan dengan pemerintah daerah dikarenakan Kodim tidak mempunyai kebijakan yang mengatur tentang penyiapan sarana dan prasarana pertanian serta keterlibatan Kodim sebagai penyuluh pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan

memiliki nilai yang lebih rendah 2 tingkat dibandingkan dengan Pemerintah Daerah.

Pengukuran tingkat kepentingan *stakeholder*

Tabel 4 menjelaskan tingkat kepentingan Pemerintah Daerah tinggi (4-5 dalam skala likert). Keberadaan nilai yang tinggi bermula dari adanya otonomi daerah yang berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. *Stakeholders* dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu program swasembada pangan khususnya UPSUS PAJALE. Nilai tersebut menjelaskan bahwa kepentingan Pemerintah Daerah, Dinas Tanaman Pangan, penyuluh serta petani memiliki peran yang dominan terhadap kepentingan program tersebut karena program UPSUS merupakan program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah selaku *stakeholder* langsung dari kementerian pertanian sehingga tinggkat kepentingan pemerintah daerah tinggi.

Tabel 4 Tingkat kepentingan *stakeholder*

No	Stakeholder	Score			
		Sangat Tinggi	Tinggi	Cukup Tinggi	Kurang Tinggi Rendah
1	Pemda	x			
2	Kodim (Babinsa)		x		
3	Dinas Ketahanan Pangan		x		
4	Dinas Tanaman Pangan	x			
5	Penyuluh Pertanian	x			
6	Kelompok Tani			x	

Dinas Ketahanan Pangan dan Kodim memiliki nilai yang lebih rendah dalam tingkat kepentingan program tersebut karena Kodim hanya sebagai pendukung dalam program UPSUS dan Dinas Ketahanan Pangan sebagai penyedia data untuk program ketahanan pangan yang dilaksanakan di daerah.

Pengukuran Tingkat Legitimasi

Hubungan tingkat legitimasi masing - masing *stakeholder* terhadap peran serta dalam mensukseskan program swasembada pangan terutama program UPSUS PAJALE yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dimana tingkat legitimasi memiliki peran sangat penting bagi *stakeholder* dalam melaksanakan program yang sudah dicanangkan, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 5. Tingkat Legitimasi yang tinggi dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang memiliki hak atas kebijakan yang dikeluarkan di wilayahnya serta

mengatur semua kebijakan yang akan dilaksanakan di wilayah administrasi daerah tersebut.

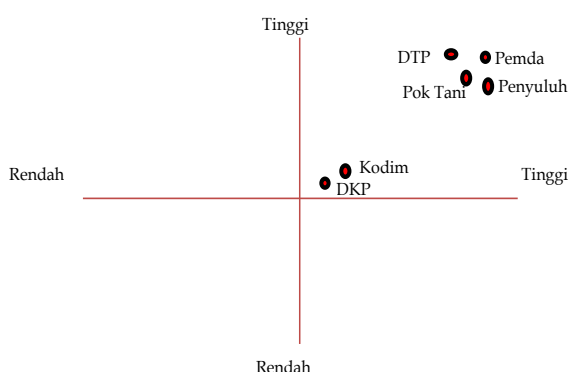
Tabel 5. Tingkat Legitimasi *Stakeholder*

No	Stakeholder	Score			
		Sangat Tinggi	Tinggi	Cukup Tinggi	Kurang Tinggi Rendah
1	Pemda	x			
2	Kodim (Babinsa)			x	
3	Dinas Ketahanan Pangan		x		
4	Dinas Tanaman Pangan	x			
5	Penyuluh Pertanian		x		
6	Kelompok Tani			x	

Tingkat legitimasi yang paling rendah dimiliki oleh kelompok tani dimana kelompok tani karena kelompok tani tidak bisa mengeluarkan kebijakan atas pelaksanaan program tersebut dan tingkat legitimasi Kodim dalam program UPSUS sebagai pendukung serta pengawasan sesuai yang sudah disebutkan dalam Mou KASAD dengan Kementerian Pertanian.

Hubungan Tingkat Kepentingan Dengan Tingkat Kekuatan

Gambar 2 menjelaskan tentang hubungan tingkat kekuatan masing – masing *stakeholder* dengan tingkat kepentingan *stakeholder* sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat kepentingan dalam pelaksanaan suatu program baik yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan di suatu instansi atau organisasi.



Gambar 2.

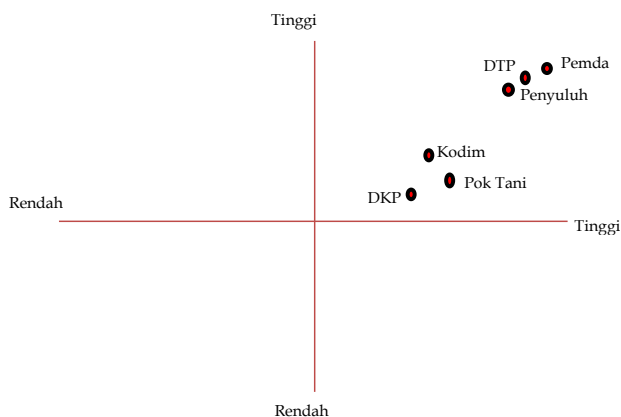
Matrik hubungan antara tingkat kekuatan dengan tingkat kepentingan dalam program UPSUS PAJALE

Tingkat kepentingan serta tingkat kekuatan paling tinggi dalam program UPSUS PAJALE yang sedang dilaksanakan adalah 4 stakeholder yaitu : Pemerintah Daerah, Dinas Tanaman Pangan, Penyuluh Pertanian dan Petani dikarenakan program tersebut merupakan program yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dengan dinas tanaman pangan, peran petani dan penyuluh pertanian sebagai pelaksana di lapangan program tersebut.

Masing-masing *stakeholder* membentuk *gap* yang artinya dalam melaksanakan kegiatan dibutuhkan koordinasi yang ketat antar *stakeholder* guna mengurangi *gap* yang terjadi sehingga tingkat kepentingan serta tingkat kekuatan masing-masing stakeholder dapat berguna untuk keberhasilan suatu program yang di laksanakan.

Hubungan tingkat kekuatan dengan legitimasi.

Hubungan antara tingkat kekuatan dengan tingkat legitimasi yang dimiliki masing-masing *stakeholder* dalam program swasembada pangan terutama program UPSUS PAJALE yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah disajikan pada Gambar 3. *Stakeholder* yang memiliki tingkat kekuatan serta tingkat legitimasi tinggi ada 3 *stakeholder* yaitu: Pemerintah Daerah (5;5), Dinas Tanaman Pangan (4;5) serta Penyuluh Pertanian (4;4) (*Aktor*) karena peran dan fungsi mereka dijelaskan dalam peraturan yang mengatur tentang legalitas keterlibatan baik pengadaan infrastruktur maupun keterlibatan dibidang lainnya yang berkaitan tentang program UPSUS PAJALE.



Gambar 3.

Matrik hubungan antara tingkat kekuatan dengan tingkat legitimasi dalam program UPSUS PAJALE

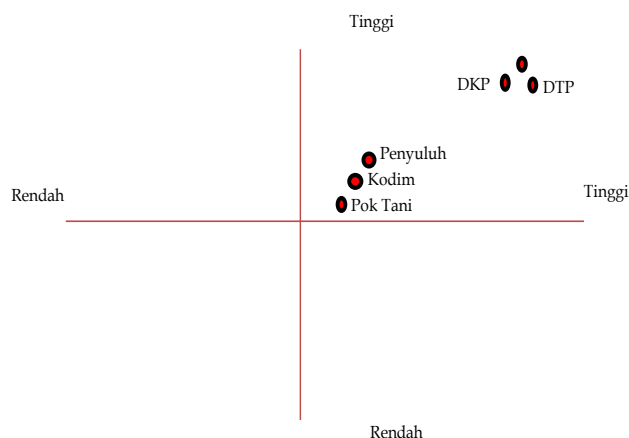
Dinas Ketahanan Pangan memiliki tingkat kekuatan yang tinggi akan tetapi memiliki tingkat legitimasi yang lebih rendah dikarenakan Dinas

Ketahanan Pangan merupakan badan pengawas program tentang pelaksanaan swasembada pangan di wilayah. Kelompok tani (petani) (3;4) memiliki tingkat kekuatan yang cukup tinggi sebagai pelaksana di lapangan tetapi tingkat legitimasi yang cukup rendah.

Hubungan tingkat kepentingan dengan legitimasi.

Gambar 4 merupakan penjelasan tentang bagaimana hubungan tingkat kepentingan dengan tingkat legitimasi yang dimiliki masing-masing *stakeholder* program swasembada pangan di wilayah khususnya program UPSUS PAJALE. Tingkat kepentingan dan tingkat legitimasi yang tinggi dimiliki oleh 3 stakeholder antara lain : Pemerintah Daerah (5;5) memiliki tingkat kepentingan serta tingkat legitimasi yang tinggi dibandingkan dengan 2 stakeholder yang lainnya karena Pemerintah Daerah sebagai penentu kebijakan di daerah yang mengatur tentang keterlibatan stakeholder lain dalam program UPSUS PAJALE.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai nilai (4;4) karena dinas ketahanan pangan mempunyai peran penting dalam menyediakan tentang data program ketahanan pangan yang dilaksanakan secara nasional.



Gambar 4.

Matrik hubungan antara tingkat kepentingan dengan tingkat legitimasi dalam program UPSUS PAJALE

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berkaitan dengan peran masing-masing *stakeholder* pada program UPSUS PAJALE (Padi, Jagung dan kedelai) yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara antara lain:

- a. Pemerintah Daerah. Melakukan dan memverifikasi data yang berkaitan dengan luas sawah, luas tanam, luas panen dan produktivitas program, serta mengawasi dan membuat laporan yang berkaitan dengan program UPSUS Pajale.
- b. Kodim (Babinsa). Melakukan pendampingan terhadap penyuluh pertanian dengan berkoordinasi dengan penyuluh dari pemerintah Daerah serta melaksanakan pemantauan terhadap program UPSUS Pajale.
- c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural. Membuat perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program UPSUS Pajale baik sarana maupun prasarana serta pengawasan terhadap mutu hasil pertanian.
- d. Dinas Ketahanan Pangan. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, cadangan pangan serta keamanan pangan di wilayah.
- e. Penyuluh. Memfasilitasi serta memberikan pembelajaran terhadap kelompok tani serta menjadi jembatan penghubung antara kelompok tani dengan pemerintah daerah dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan program UPSUS Pajale.
- f. Petani. Melaksanakan program UPSUS dengan menyiapkan lahan yang akan digunakan serta melaporkan segala permasalahan atau kendala yang dialami dilapangan serta koordinasi dengan penyuluh pertanian guna meningkatkan hasil program yang dilaksanakan.

Tingkat kepentingan, tingkat kekuatan serta tingkat legitimasi dalam pelaksanaan program dimiliki oleh Pemerintah Daerah selaku berperan penting dalam terlaksananya program peningkatan produksi UPSUS PAJALE. Pemerintah Daerah selaku *stakeholder* utama atau primer dalam program mempunyai kewenangan serta kekuatan mengatur kebijakan dalam mendukung program tersebut.

Saran

1. Perlu adanya keterlibatan *stakeholder* lain terutama BPS dalam penyajian hasil data dari program UPSUS PAJALE karena masih terdapat perbedaan data dilapangan tentang hasil dari program tersebut.
2. Perlunya peningkatan tentang sinergitas antara penyuluh pertanian yang dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural dengan penyuluh dari Kodim tentang peran dan tugas penyuluh pertanian dalam rangka mensukseskan program UPSUS PAJALE.

3. Sinergitas masing - masing *stakeholder* dalam program UPSUS PAJALE perlu ditingkatkan dengan melakukan koordinasi masing - masing *stakeholder* tentang setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam program UPSUS PAJALE.
4. Dalam penelitian selanjutnya perlu dilibatkannya instansi POLRI, BPS serta Dinas PU dalam program peningkatan, penyediaan data serta pengawasan dan penindakan penyalahgunaan pupuk bersubsidi sehingga program dapat berjalan sesuai dengan sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik 2010 Indonesia Dalam Angka 2010. BPS Indonesia dalam angka.
- Badan Pusat Statistik 2012 Bengkulu Utara Dalam Angka Tahun 2012. BPS Kab.Bengkulu Utara.
- Badan Pusat Statistik 2013 Bengkulu Utara Dalam Angka Tahun 2013. BPS Kab.Bengkulu Utara.
- Badan Pusat Statistik 2014 Bengkulu Utara Dalam Angka Tahun 2014. BPS Kab.Bengkulu Utara.
- Badan Pusat Statistik 2015 Bengkulu Utara Dalam Angka Tahun 2015. BPS Kab.Bengkulu Utara.
- Badan Pusat Statistik 2016 Bengkulu Utara Dalam Angka Tahun 2016. BPS Kab.Bengkulu Utara.
- Clarkson, M.B. 1995. A stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. Academy of Management
- Clealand, David. I, 1995. Project Management Strategic Design and Implementation. Singapore: MCGraw-Hill.
- Creswell, John W., 2008. Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 4th ed. SAGE Publications, Inc
- Freeman, R. E. 1984. Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Blackwell Publishing.
- Freeman, R.E. 1997 Stakeholder Theory in: Werhane, P.H. & Freeman, R.E. (eds.), Blackwell Encyclopedia of Business Ethics. Oxford: Blackwell.
- Freeman, R.E. 1999 Divergent Stakeholder Theory, in: Academy of Management.
- Freeman, J. 1999. Stakeholder Influence Strategies, in: Academy of Management.
- Herdiasti. 2012. Penyuluhan Pertanian. Yogyakarta: Kanisius.
- Hermans dan Thissen. 2009. Actor analysis methods and their use for public policy analysts. European Journal of Operational Research. 196(2), 808-818

- Jhon M Bryson, 2004. Stakeholder Identification n Analisis Techniques, In Hubert Humphery Institute Of Publik Affair.
- Manulang S, 2018. Teori dan Teknik Analisis Stakeholder, Bogor: IPB Press.
- Pouloudi, Athanasia dan Edgar. A. Whitley 1997. Stakeholder identifikacation in organizational sytem. European Journal of Information Systems. 6 (1): 1-14
- Suparta, 2010. Analisis komparasi usahatani padi sawah Metode SRI (system of rice intensification) dan konvensional Di kecamatan gerih kabupaten ngawi. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN". Surabaya.